

# Debat Habiskan Energi

Cetak | 24 Maret 2015

12 dibaca 0 komentar

**YOGYAKARTA, KOMPAS** — Perdebatan ihwal syarat calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian melebar ke suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta, dinilai tak produktif dan hanya menghabiskan energi. Dewan Perwakilan Rakyat DIY diminta mengutamakan penyusunan sejumlah peraturan yang lebih dibutuhkan masyarakat luas, misalnya terkait pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan.

"DPRD DIY sebaiknya tidak menghabiskan energi memperdebatkan syarat calon gubernur. Ada banyak agenda lain yang seharusnya mendapat perhatian," kata dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias, saat mempresentasikan hasil penelitiannya tentang keistimewaan DIY, Senin (23/3), di Yogyakarta.

Seperti diberitakan, belakangan ini DPRD DIY terus berdebat mengenai syarat calon Gubernur DIY yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wagub. Aturan yang diperdebatkan itu secara tak langsung menyatakan Gubernur dan Wagub DIY harus dijabat laki-laki.

Karena Gubernur DIY juga merupakan Raja Keraton Yogyakarta, perdebatan pun melebar ke suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta. Situasi semakin rumit karena Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X tidak memiliki anak laki-laki. Dalam beberapa kesempatan, Sultan yang juga Gubernur DIY meminta pasal itu direvisi sehingga memungkinkan perempuan menjabat sebagai Gubernur DIY.

Namun, usulan ditentang tiga adik Sultan karena revisi aturan itu akan memungkinkan Raja Keraton Yogyakarta dijabat perempuan. Ketiga adik Sultan itu beranggapan, Raja Keraton Yogyakarta harus dijabat laki-laki.

Bayu mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Belum ada kebutuhan melakukan pergantian Gubernur DIY dalam waktu dekat. Suksesi raja di Keraton Yogyakarta juga diyakini tak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Sultan Hamengku Buwono X masih sangat sehat. Jadi sebenarnya belum perlu ada debat soal suksesi raja," ujarnya.

Dia menambahkan, jika anggota DPRD DIY tak kunjung bersepakat, sebaiknya pembahasan tentang rancangan peraturan daerah tersebut dihentikan.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto optimistis perbedaan pendapat syarat calon Gubernur DIY segera berakhir. Saat ini, lima dari tujuh fraksi di

DPRD DIY memutuskan menolak merevisi aturan yang mengharuskan gubernur dijabat laki-laki. Hanya Fraksi PDI-P dan Fraksi Gerindra yang belum menyatakan sikap.

"Kami tak mau terburu-buru mengambil sikap terkait masalah ini," kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD DIY Eko Suwanto. **(HRS)**

---

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Maret 2015, di halaman 21 dengan judul "Debat Habiskan Energi".

 Bagikan  0  Bagikan  0  Tweet  0

---

## KOMENTAR



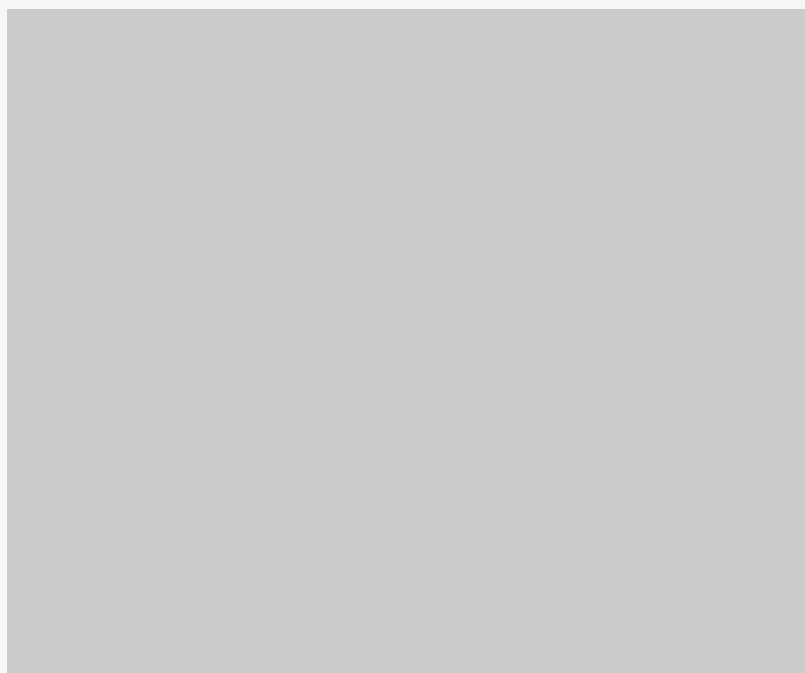
**Bayu Kurniadi**

Tulis Komentar...

Kirim

---

[^ Kembali ke Atas](#)



**KOMPAS**  
AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia (KG), yang didirikan oleh PK. Ojong (almarhum) dan Jakob Oetama sejak 28 Juni 1965.

Mengusung semboyan "Amanat Hati Nurani Rakyat", Kompas dikenal sebagai sumber informasi terpercaya, akurat, dan

### REDAKSI

 Gedung Kompas Gramedia  
Jalan Palmerah Selatan 26-28  
Jakarta 10270 Indonesia

 021 - 534 7710/20/30, 530 2200

### IKLAN

 Gedung Kompas Gramedia  
Jalan Palmerah Selatan 15

### TENTANG KAMI

Profil Perusahaan  
Tonggak Sejarah

### PRODUK

KOMPAS Kiosk  
print.kompas.com  
KOMPAS ePaper

mendalam.

KRITIK & SARAN

NEWSLETTER

Jakarta 10270 Indonesia

☎ 021 - 5367 9909, 5367 9599

✉ [kompas@kompas.com](mailto:kompas@kompas.com)

IKLAN

Tarif Iklan Reguler

Tarif Iklan Klasika

Info Klasika

Tanya Jawab

Hubungi Kami

Media Sosial



Copyright © 2013 - 2015 Kompas. All rights reserved.

